

Pelatihan Peningkatan Kapasitas Masyarakat (PKM) Pengelolaan Keuangan Program KOTAKU Kabupaten Tuban

Suyitno¹, Yulie Wahyuningsih^{2*}

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen, Universitas Muhammadiyah Lamongan,
Lamongan, Indonesia

Email: ^{1*}yitnomasdar@gmail.com, ²yuliewahyuningsih78@gmail.com

(* : coresponding author)

Abstrak– Memperhatikan efektifitas peran Badan Kesawadayaan Masyarakat (BKM) sebagai entitas yang diprakarsai, dibentuk dan dikelola secara mandiri oleh masyarakat melalui program PNPMP, selanjutnya berubah menjadi program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). BKM merupakan wadah untuk menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam memenuhi hajat hidup dari aspek ekonomi, sosial dan kelayakan infrastruktur lingkungan permukiman. Dalam membangun kepercayaan publik, BKM perlu mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola keuangan yang dibelanjakan dalam mewujudkan program kerjanya. Sebagai wujud partisipasi konkrit dalam mendorong percepatan capaian kesejahteraan masyarakat melalui Program KOTAKU, dipandang perlu untuk melaksanakan Pengabdian Masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan pengetahuan Sekretariat dan UPK-BKM pada 17 Kelurahan di wilayah Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban. Kegiatan diawali dengan sesi penyampaian teori, praktek penyusunan laporan keuangan dan studi kasus. Peserta sangat antusias mengikuti kegiatan mulai awal sampai dengan akhir dan kegiatan berjalan dengan terib serta lancar..

Kata Kunci: BKM, Laporan Keuangan, Capacity, KOTAKU

Abstract–Paying attention to the effectiveness of the role of the Badan Kesawadayaan Masyarakat (BKM) as an entity that was initiated, formed and managed independently by the community through the PNPMP program, which later turned into the Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) program. BKM is a forum to accommodate the aspirations and needs of the community in meeting the needs of life from the economic, social and infrastructure aspects of the settlement environment. In building public trust, BKM needs to realize the principles of transparency and accountability in managing the finances spent in realizing its work program. As a form of concrete participation in encouraging the acceleration of the achievement of community welfare through the KOTAKU Program, it is deemed necessary to carry out Community Service which aims to increase the capacity and knowledge of the Sekretariat BKM in 17 Kelurahan in the Tuban District, Tuban Regency. The activity begins with a session on delivering theory, practice in preparing financial reports and case studies. Participants were very enthusiastic about participating in the activity from beginning to end and the activity ran smoothly and orderly

Keywords: BKM, Financial Report, Capacity, KOTAKU

1. PENDAHULUAN

Dalam Upaya mewujudkan intensitas program penanggulangan kemiskinan, pemerintah selalu menawarkan program kerja yang berorientasi kepada pengembangan ekonomi rakyat dengan mendorong usaha-usaha kecil dan menengah untuk mendapat suntikan dana, agar usaha tersebut dapat lebih berkembang secara signifikan. Penentuan pemberian dana tidak dilakukan begitu saja namun setelah semua peserta berhasil lulus melewati beberapa tahapan seleksi. Dilakukan dengan harapan agar pemerintah tidak salah dalam penentuan peserta yang memang pantas menerima bantuan program kerja ini.

Berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Nomor: 25/KEP/MENKO/KESRA/VII/2007 per tanggal 30 Juli 2007 mengulas berkaitan dengan Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri), dalam siklus pelaksanaan program P2KP dan atau PNPMP-P2KP ini telah memuat proses penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat yaitu Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dan penguatan kapasitas pemerintah daerah secara berkelanjutan. Melalui kegiatan penguatan kelembagaan masyarakat tersebut, diharapkan agar tercipta proses transformasi secara bertahap untuk menjadi masyarakat yang mandiri dan menuju masyarakat madani dengan didukung kapasitas tata pemerintahan yang baik (Good Governance).

Kesinambungan program dari PNPM menjadi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR No.14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Konsep pencegahan yaitu: (1) pengawasan dan pengendalian terhadap perizinan, standar teknis dan kelaikan fungsi. (2) Pemberdayaan masyarakat terhadap penyuluhan, bantuan teknis berupa penyusunan, perencanaan, penguatan kapasitas kelembagaan dan pembimbingan. Sedangkan konsep peningkatan kualitas berupa peningkatan lokasi, pola penanganan dan permukiman kembali. Program KOTAKU dalam pelaksanaannya menggunakan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, masyarakat dan Perguruan Tinggi yang di representasikan oleh BKM dan stakeholder lainnya dengan memposisikan masyarakat dan pemerintah kabupaten sebagai pelaku utama, guna meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar permukiman kumuh perkotaan dan mencegah timbulnya permukiman kumuh baru dalam rangka untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menegaskan bahwa dosen merupakan pelaksanaan salah satu unsur Tri Dharma Perguruan Tinggi, salah satunya adalah Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM).

Mengacu pada latar belakang tersebut diatas, Penulis yang berasal dari Program Studi Manajemen Universitas Muhammadiyah Lamongan telah mengadakan “Pelatihan Pengembangan Kapasitas Masyarakat (PKM) Pengelolaan Keuangan Program KOTAKU Kabupaten Tuban” sebagai bentuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, berupa Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM).

Adapun dasar kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, adalah: (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; (3) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi; (4) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; (5) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru; (6) Pedoman Akademik FEB Universitas Muhammadiyah Lamongan; (7) Program Kerja Prodi Manajemen FEB Universitas Muhammadiyah Lamongan.

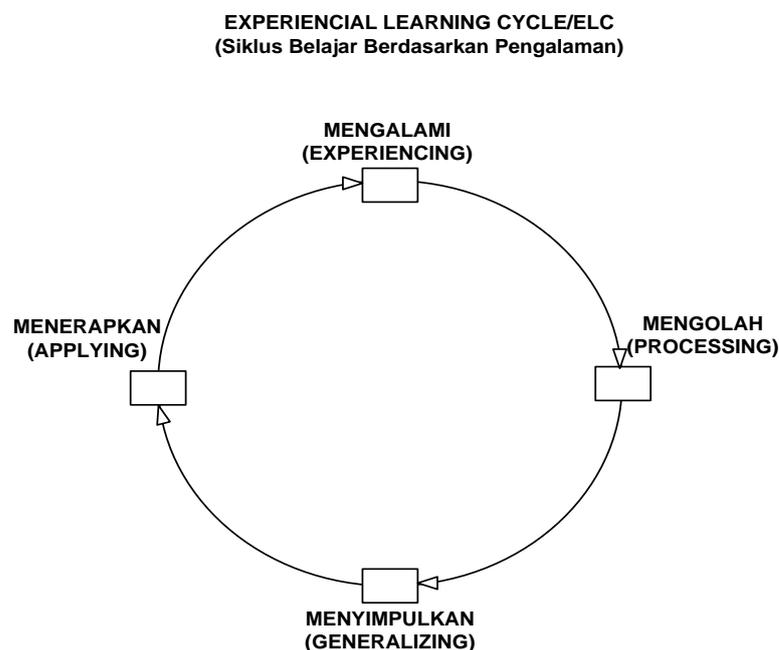
Sedangkan tujuan diadakannya kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, adalah: (1) Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi; (2) Merealisasikan program kerja Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis; dan (3) Meningkatkan pengetahuan, pemahaman, serta keterampilan Sekretariat BKM dalam pengelolaan keuangan program KOTAKU di Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur.

Target Pelatihan Peningkatan Kapasitas Masyarakat (PKM) Pengelolaan Keuangan Program KOTAKU Kabupaten Tuban” yaitu: (1) Meningkatnya kemampuan, Mengembangkan keahlian serta ketrampilan sekretariat BKM dalam mengelola keuangan di Kabupaten Tuban, (Priyono, 2007); (2) Meningkatnya kecakapan sekretariat BKM dalam penata-bukuan laporan keuangan program KOTAKU (Mustafa 2017); (3) Terwujudnya komitmen untuk menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan BKM (Halim, 2013); (4) Meningkatnya motivasi sekretariat BKM untuk melaksanakan amanah lembaga guna menumbuhkan nilai luhur kemanusiaan dan kemasyarakatan (Sutrisno, 2014); (5) Terwujudnya komitmen untuk meningkatkan performa tatakelola kelembagaan BKM sebagai wadah aspirasi dan kebutuhan masyarakat terhadap lingkungan permukiman yang layak, sehat dan produktif (Sutrisno, 2014).

2. METODE PELAKSANAAN

2.1. Pendekatan Pelatihan

Pelatihan dilakukan dengan menggunakan pendekatan proses pendidikan orang dewasa (POD) dimana trainer dan peserta merupakan mitra/rekan belajar yang secara partisipatif bersama-sama menggali pengalaman secara terstruktur (model proses pembelajaran ELC, sebagaimana diagram berikut) yang kemudian dirumuskan dalam prinsip umum yang akan diterapkan.



Gambar 1. Siklus Pendekatan ELC

2.2. Alur Pelaksanaan Pelatihan

Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Masyarakat (PKM) Pengelolaan Keuangan Sekretariat BKM pada program KOTAKU dilakukan dengan metode kombinasi, diawali dengan penyampaian materi teori tentang mekanisme dan instrumen penyusunan laporan keuangan berdasarkan buku pedoman penyusunan laporan keuangan sekretariat dan UPK-BKM yang diterbitkan oleh Program KOTAKU. Dilanjutkan dengan bedah kasus terhadap berbagai problematika yang dialami oleh sekretariat BKM dalam melaksanakan penatabukuan dana pinjaman bergulir, pembangunan infrastruktur dan kegiatan sosial kemasyarakatan melalui program KOTAKU. Kegiatan diakhiri dengan penyusunan rencana tindak lanjut sesuai dengan masalah yang terjadi pada masing-masing Kelurahan, selanjutnya dilakukan coaching clinic.

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) prodi Manajemen Universitas Muhammadiyah Lamongan dilaksanakan selama 2 (hari), pada tanggal 09 sampai dengan 10 Juni 2022 bertempat di Balai kelurahan Latsari Kabupaten Tuban. Melibatkan 17 orang Sekretariat BKM yang berasal dari 17 Kelurahan di Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, adapun Narasumber pada kegiatan tersebut, yaitu 3 orang Dosen program studi Manajemen Universitas Muhammadiyah Lamongan, dengan masing-masing berperan sebagai Fasilitator penyampaian materi teori, pendamping kegiatan bedah kasus dan pendamping Coaching Klinik.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

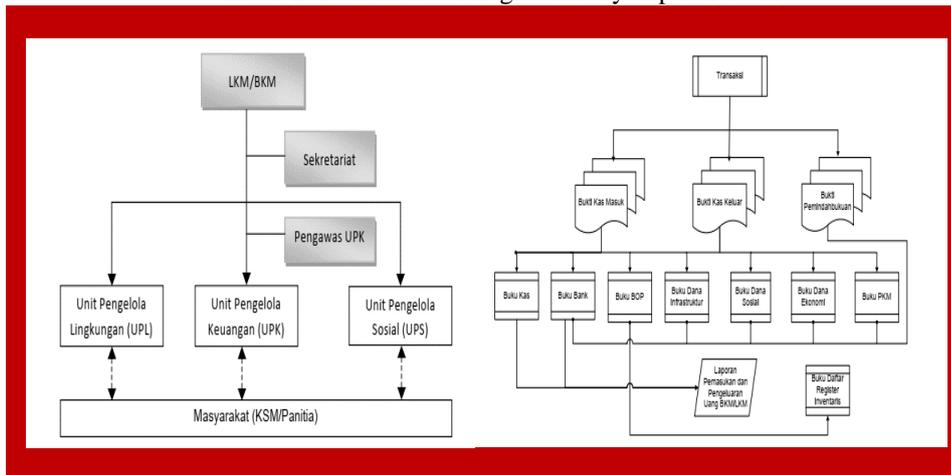
3.1 Acara Pembukaan dan Penyampaian Materi

Acara diawali dengan pembukaan oleh pembawa acara, dilanjutkan dengan sambutan dan pengarahan oleh koordinator Forum Komunikasi Antar BKM (FKA-BKM) Kabupaten Tuban, menguraikan tentang pentingnya kegiatan pelatihan tentang pengelolaan keuangan BKM agar terwujud transparansi dan akuntabilitas lembaga sehingga dapat membangun trust (Kepercayaan) para stakeholder sehingga tertarik untuk turut berpartisipasi bersama dengan BKM dalam upaya melakukan penataan lingkungan permukiman yang layak, sehat dan produktif sebagai bagian integral dari upaya penanggulangan kemiskinan secara mandiri dan berkelanjutan.

Kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi tentang prosedur penata-kerjaan pembukuan sekretariat BKM dan sistematika Penyusunan Laporan Keuangan BKM. Materi disampaikan dengan metode ceramah, eksplorasi, tanya jawab dan braisntroming. Menempatkan peserta sebagai pelaku yang sudah memiliki pengalaman dengan menggunakan pendekatan pendidikan orang dewasa, sehingga forum berjalan secara kondusif dan dinamis.



Gambar 2. Dokumentasi Kegiatan Penyampaian Teori



Gambar 3. Materi Struktur BKM dan Diagram Alur Penyusunan Laporan Keuangan BKM

3.2. Materi Bedah Kasus

Kegiatan diteruskan dengan bedah kasus, menggunakan pendekatan diskusi kelompok, agar dapat lebih terbuka, sehingga peserta dapat menyampaikan semua kesulitan dan hambatan-hambatan dalam melaksanakan tugasnya sebagai sekretariat yang berperan untuk melaksanakan penata-kerjaan pembukuan dan penyusunan laporan keuangan BKM. Pelbagai kasus yang mengemuka dipetakan secara cermat agar mudah memberikan penyelesaiannya. Dosen pendamping memfasilitasi kegiatan dengan membuka ruang seluas-luasnya untuk menyampaikan permasalahan secara terbuka, dan memperlakukan peserta secara setara, sehingga terbangun komunikasi efektif dan berkualitas.



Gambar 4. Dokumentasi Bedah Kasus dan Praktek Penyusunan Laporan Keuangan

3.3. Materi Bedah Kasus

Selanjutnya dilakukan Coaching Clinic pada seluruh peserta sesuai dengan permasalahan yang dihadapi dan telah deklompokkan pada kegiatan sebelumnya. Permasalahan diurai perlahan-lahan dimulai dari akar masalahnya, peserta juga dituntun agar menguasai penyelesaian masalah melalui pendekatan teknis maupun kearifan lokal. Memastikan para peserta telah menguasai materi dengan baik, maka Dosen pendamping memeriksa secara seksama hasil pekerjaan setiap peserta dan memberikan catatan secukupnya. Kegiatan diakhiri dengan penyepakatan penyusunan rencana tindak lanjut untuk menguatkan pengetahuan dan ketrampilan para peserta, baik melalui tatap muka maupun melalui media komunikasi digital. Tampak wajah para peserta berseri-seri dan sumringah menandakan kepuasan atas harapan yang telah dicapai pada kegiatan tersebut.



Gambar 5. Dokumentasi Kegiatan Photo Bersama dan Kesepakatan Tindak Lanjut

4. KESIMPULAN

Bahwa kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Masyarakat (PKM) tentang Pengelolaan Keuangan BKM Pada Program KOTAKU di Kabupaten Tuban, sangat strategis dan urgen untuk dilaksanakan, sebab kegiatan tersebut dapat meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan para

sekretariat BKM dalam melaksanakan tugas serta tanggungjawabnya untuk melaksanakan penatakerjaan pembukuan dan penyusunan laporan keuangan secara transparan dan akuntabel. Kemampuan dan kerampilan sekretariat BKM dalam menyajikan laporan keuangan, sangat menentukan hasil audit yang dilakukan oleh BPKP maupun audit eksternal yang dilaksanakan oleh Auditor KAP secara periodik setiap akhir periode pembukuan. Sehingga kesalahan teknis penyajian laporan keuangan dapat diminimalisir dan mencegah terjadinya kesalahan substansif yang dapat berakibat sangat fatal bagi keberlanjutan organisasi BKM. Penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilaksanakan oleh Dosen Prodi S1 Manajemen Universitas Muhammadiyah Lamongan sangat membantu pelaksanaan penatakerjaan pembukuan dan laporan keuangan BKM dan diharapkan oleh seluruh peserta dapat dilanjutkan pada masa mendatang.

REFERENCES

- Halim, Abdul. 2013. *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Musthafa. 2017. *Manajemen Keuangan*. Jakarta: Andi Publisher.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.
- Priyono. 2007. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Zifatama.
- Sutrisno, Bambang. 2014. Pedoman Teknis Program Kota tanpa Kumuh (KOTAKU). Tersedia:http://kotaku.pu.go.id:8081/pustaka/files/170524_materi_rakor_slum_allevation_2017/MATERI%20DUKUNG%20KOTAKU/02.%20Petunjuk%20Pelaksanaan%20KOTAKU%20Tingkat%20Kota.pdf (diakses 23 Mei 2022).